



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 467/A/2025

TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2029

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang bersih dan sehat diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk menjaga lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, tanggal 24 Desember 2024, Bupati diwajibkan menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, tanggal 24 Desember 2024;

2. Surat Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.94/G/G.1/PLB.0.3/B/2/2025, perihal Tindaklanjut Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, tanggal 7 Februari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kulon Progo;
4. Panewu se-Kulon Progo
5. Lurah se-Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 467/A/2025
TENTANG
PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025-2029

PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2029

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target					Satuan	Output					Outcome					Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
1. Pengelolaan Sampah di Hulu	1. Meningkatkan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. Melakukan Upaya Transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	7	7	8	9	9	Kalurahan	Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya monitoring evaluasi Pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya monitoring evaluasi Pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Masyarakat tahu dan mau melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH, Dinkes, DPMKPPKB, Kalurahan
		2. Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	7	7	8	9	9	Kalurahan	Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Setiap rumah, usaha tahu dan mau melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH, Dinkes, DPMKPPKB, Kalurahan
2. Peningkatan dan optimalisasi fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, Reuse, Recycle) sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular	2. Peningkatan dan optimalisasi fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, Reuse, Recycle) sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular	1. Membentuk bank sampah unit di setiap padukuhan	3	3	3	3	3	Padukuhan	Terlaksananya pembentukan bank sampah unit di 3 padukuhan	Terlaksananya pembentukan bank sampah unit di 3 padukuhan	Terlaksananya pembentukan bank sampah unit di 3 padukuhan	Terlaksananya pembentukan bank sampah unit di 3 padukuhan	Terlaksananya pembentukan bank sampah unit di 3 padukuhan	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah unit	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat melalui bank sampah unit	APBD	DLH, Kalurahan
		2. Membentuk bank sampah induk	1	1	1	1	1	Kalurahan / Kelurahan	Terlaksananya pembentukan bank sampah induk di 1 kalurahan / kelurahan	Terlaksananya pembentukan bank sampah induk di 1 kalurahan / kelurahan	Terlaksananya pembentukan bank sampah induk di 1 kalurahan / kelurahan	Terlaksananya pembentukan bank sampah induk di 1 kalurahan / kelurahan	Terlaksananya pembentukan bank sampah induk di 1 kalurahan / kelurahan	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah induk	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah induk	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah induk	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah induk	Peningkatan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah induk	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat melalui bank sampah induk	APBD	DLH, Kapanewon
		3. Mengoptimalkan bank sampah unit, yang ada di setiap Kapanewon	10	10	10	10	10	Bank Sampah Unit	Terlaksananya monitoring bank sampah unit	Terlaksananya monitoring bank sampah unit	Terlaksananya monitoring bank sampah unit	Terlaksananya monitoring bank sampah unit	Terlaksananya monitoring bank sampah unit	Terlaksananya monitoring bank sampah unit	Peningkatan jumlah bank sampah unit yang melakukan pengelolaan sampah optimal	Peningkatan jumlah bank sampah unit yang melakukan pengelolaan sampah optimal	Peningkatan jumlah bank sampah unit yang melakukan pengelolaan sampah optimal	Peningkatan jumlah bank sampah unit yang melakukan pengelolaan sampah optimal	Peningkatan jumlah bank sampah unit yang melakukan pengelolaan sampah optimal	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat melalui bank sampah unit	APBD

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target					Satuan	Output					Outcome					Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab	
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
		4. Mengoptimalkan TPS3R yang ada	4	4	3	2	2	TPS3R	Terlaksananya optimalisasi TPS3R	Terlaksananya optimalisasi TPS3R	Terlaksananya optimalisasi TPS3R	Terlaksananya optimalisasi TPS3R	Terlaksananya optimalisasi TPS3R	Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH	
	3. Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah di masyarakat melalui peningkatan pembinaan komunikasi, edukasi dan informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader-kader kesehatan, dan LSM lingkungan	1. Penyusunan peta kebutuhan pejabat fungsional penyuluh lingkungan hidup (PELHI) dan pendidik lingkungan	1	0	1	0	1	Dokumen	Tersusunnya peta kebutuhan pejabat fungsional PELHI	-	Tersusunnya peta kebutuhan pejabat fungsional PELHI	-	Tersusunnya peta kebutuhan pejabat fungsional PELHI	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	-	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	-	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH	
		2. Penambahan pejabat fungsional penyuluh lingkungan hidup (PELHI) dan pendidik lingkungan	0	1	2	1	2	Personil	-	Terpenuhi penambahan pejabat fungsional PELHI	Terpenuhi penambahan pejabat fungsional PELHI	Terpenuhi penambahan pejabat fungsional PELHI	Terpenuhi penambahan pejabat fungsional PELHI	-	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH, BKPSDM	
		3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala	2	2	2	2	2	Pelatihan	Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH	
		4. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	10	5	5	5	5	Sosialisasi dan pembinaan sekolah	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh satuan pendidikan	APBD	DLH
		5. Mewajibkan dan mendampingi pelaporan bank sampah unit secara rutin	4	4	5	6	7	Bank Sampah	Tersusunnya laporan	Tersusunnya laporan	Tersusunnya laporan	Tersusunnya laporan	Tersusunnya laporan	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh bank sampah unit	APBD	DLH
		6. Aktivasi bank sampah yang tidak aktif melalui pembinaan dan pendampingan	2	2	2	2	2	Bank Sampah Unit	Terlaksananya pembinaan bank sampah melalui kegiatan JPSM	Terlaksananya pembinaan bank sampah melalui kegiatan JPSM	Terlaksananya pembinaan bank sampah melalui kegiatan JPSM	Terlaksananya pembinaan bank sampah melalui kegiatan JPSM	Terlaksananya pembinaan bank sampah melalui kegiatan JPSM	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah unit	Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	APBD	DLH
	4. Meningkatkan jumlah produsen dalam pengurangan sampah	1. Penyusunan peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai	1	0	0	0	0	Peraturan Bupati	Tersusunnya peraturan bupati	-	-	-	-	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan prosentase pengurangan sampah	APBD	DLH
		2. Sosialisasi peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai	5	5	4	3	2	Kegiatan sosialisasi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan prosentase pengurangan sampah	APBD	DLH
		3. Pemantauan dan evaluasi peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai	1	1	1	1	1	Dokumen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	Peningkatan prosentase pengurangan sampah	APBD	DLH	

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target					Satuan	Output					Outcome					Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
2. Pengelolaan Sampah di Hilir	1. Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah	1. Pemeliharaan sarana pengumpulan sampah	32	32	32	32	32	Unit kontainer, motor roda 3	Terpelihara kontainer dan motor roda 3	Terpelihara kontainer dan motor roda 3	Terpelihara kontainer dan motor roda 3	Terpelihara kontainer dan motor roda 3	Terpelihara kontainer dan motor roda 3	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan prosentase penanganan sampah	APBD	DLH
		2. Peningkatan layanan pengangkutan sampah	14	14	14	14	14	Unit bak dump truk dan Unit dump truk sampah/armroll	Terpelihara dump truk dan armroll	Terpelihara dumptruk dan armroll	Terpelihara dump truk dan armroll	Terpelihara dump truk dan armroll	Terpelihara dump truk dan armroll	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan prosentase penanganan sampah	APBD	DLH
		3. Penyediaan BBM	1	1	1	1	1	Kegiatan	Operasional pengangkutan lancar	Operasional pengangkutan lancar	Operasional pengangkutan lancar	Operasional pengangkutan lancar	Operasional pengangkutan lancar	Operasional pengangkutan lancar	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan prosentase penanganan sampah	APBD
	2. Peningkatan pengolahan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah	1. Pemeliharaan sarana dan prasana pengolahan sampah	1	1	1	1	1	kegiatan	Terpelihara TPA	Terpelihara TPA	Terpelihara TPA	Terpelihara TPA	Terpelihara TPA	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan prosentase penanganan sampah	APBD	DLH
		2. Operasional sarana prasarana pengolahan sampah	1	1	1	1	1	Unit Pengolah Sampah	TPA dapat beroperasi maksimal	TPA dapat beroperasi maksimal	TPA dapat beroperasi maksimal	TPA dapat beroperasi maksimal	TPA dapat beroperasi maksimal	TPA dapat beroperasi maksimal	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	Peningkatan prosentase penanganan sampah	APBD
	3. Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, optimalisasi kelembagaan dan pendanaan	1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum	4	4	4	4	4	Penertiban sampah liar	Terlaksananya penertiban sampah liar	Terlaksananya penertiban sampah liar	Terlaksananya penertiban sampah liar	Terlaksananya penertiban sampah liar	Terlaksananya penertiban sampah liar	Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	Peningkatan prosentase pengelolaan sampah	APBD	DLH
2. Optimalisasi kelembagaan		1	1	1	1	1	Pelatihan	Terlaksananya pelatihan SDM	Terlaksananya pelatihan SDM	Terlaksananya pelatihan SDM	Terlaksananya pelatihan SDM	Terlaksananya pelatihan SDM	Terlaksananya pelatihan SDM	Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	Peningkatan prosentase pengelolaan sampah	APBD	DLH
3. Optimalisasi dukungan pendanaan		1	1	1	1	1	Kerjasama pendanaan	Bertambahnya dukungan pendanaan	Bertambahnya dukungan pendanaan	Bertambahnya dukungan pendanaan	Bertambahnya dukungan pendanaan	Bertambahnya dukungan pendanaan	Bertambahnya dukungan pendanaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	Peningkatan prosentase pengelolaan sampah	APBD	DLH

Wates, 15 Desember 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN